

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF JENJANG SD SE-KOTA YOGYAKARTA

THE POLICY IMPLEMENTATION IN ORGANIZING ELEMENTARY SCHOOL LEVEL INCLUSIVE EDUCATION IN YOGYAKARTA CITY'S.

Oleh: Efika Nurahmasari Lubis (12110241040), Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Prodi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, efika_lubis@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) proses dan hasil implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SD se-Kota Yogyakarta, yang dilihat dari Struktur Birokrasi, Komunikasi, Sumberdaya, Lingkungan Kebijakan, dan Karakteristik Masalah; (2) faktor pendukung dan faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SD se-Kota Yogyakarta; dan (3) pemanfaatan faktor pendukung dan solusi faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SD se-Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian berjumlah 17 Sekolah Dasar dan merupakan penelitian populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi dokumen. Uji validitas instrumen menggunakan pengujian validitas konstruk, yaitu pendapat dari ahli. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dalam bentuk tabulasi frekuensi dan presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SD se-Kota Yogyakarta, yaitu dilihat dari struktur birokrasi 12 sekolah (70,59%) memiliki program kerja dengan baik. Dilihat dari komunikasi, 10 sekolah (58,82%) menyediakan 'quota' bagi ABK dengan cukup baik dan 9 sekolah (52,94%) memberikan layanan tes psikologi dengan cukup baik. Dilihat dari sumberdaya, sekolah melakukan modifikasi yang disesuaikan kebutuhan ABK dalam aspek kurikulum cukup baik (41,18%), pembelajaran dengan kriteria kurang (29,41%), dan penilaian dengan baik (64,71%). Lingkungan Kebijakan terdiri dari bantuan dari orang tua murid, masyarakat, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam bentuk perhatian, kerjasama, motivasi, finansial, dan sosialisasi. Karakteristik Masalah, terdiri dari aspek masalah yang terkait dengan sarana prasarana, bahan ajar/buku, kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi. Aspek kendala berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti Kepala Sekolah, Guru, GPK, dan Orang tua murid. (2) Faktor pendukung terdiri dari adanya dukungan warga sekolah dan pihak luar sekolah dalam menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Faktor penghambat diantaranya adalah Kepala Sekolah, Guru, dan Orang tua belum optimal dalam memahami konsep pendidikan inklusif, GPK kurang mencukupi, sarana prasarana dan bahan ajar/buku belum memadai, pemahaman modifikasi kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi belum optimal. (3) Pemanfaatan faktor pendukung dijadikan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Sedangkan solusi dari faktor penghambat yaitu dengan adanya rapat, sosialisasi, pelatihan, dan bantuan dari Dinas Pendidikan yang dapat memberikan perbaikan sekolah untuk selanjutnya.

Kata kunci: Implementasi, Pendidikan Inklusif, Yogyakarta.

Abstract

This research is aimed to find out and describe about: (1) The process and the results of policy implementation in organizing inclusive education viewed from bureaucracy structure, communication, resource, environmental policy, and characteristics of the problem; and (2) The supporting factor and obstacle factor in organizing elementary school level inclusive education in Yogyakarta city; and (3) The utilization of the factors supporting and inhibiting factor solutions implementation of inclusive elementary education as the city of Yogyakarta. This research is descriptive quantitative research in nature. The populations for this research are 17 elementary schools. Questionnaire and document study were used to collect the data. The data analysis used is

descriptive statistics analysis in the form of frequency tabulation and percentage. The results of the research shows: (1) The policy implementation in organizing elementary school level inclusive education in Yogyakarta city, namely in terms of the bureaucratic structure 12 schools (70.59%) had a good work program. Judging from the communication, 10 schools (58.82%) provide a 'quota' for ABK pretty well and the nine schools (52.94%) provide psychological testing services quite well. Judging from the resources, schools make modifications to meet the needs ABK in aspects of the curriculum is good enough (41.18%), learning with less criteria (29.41%), and appraisal well (64.71%). Policy environment consists of support from parents, community, school committees, and the Department of Education in the form of attention, cooperation, motivation, financial, and socializing. Characteristics Problems, consisting of aspects of the problems associated with infrastructure, teaching materials / books, curriculum, learning systems, and evaluation. Aspects of the constraints associated with the Human Resources (HR) is involved in the implementation of inclusive education, such as school principals, teachers, GPK, and Parents. (2) The supporting factor is the support from the community around the schools and outside the schools in the organizing of the policy of inclusive education. The obstacle factor is the fact that the headmasters, teachers and parents are not yet optimal in understanding the concept of inclusive education, the lack of special guidance teachers, supporting facilities and learning materials/books, the understanding of the modified curriculum, and also the learning process and evaluation which are not optimal. (3) Utilization of supporting factors used to assist the smooth implementation of inclusive education in accordance with the policies that have been formulated. While the solution of an inhibiting factor is the presence of the meeting, socialization, training, and assistance from the Department of Education to provide school improvement for the next.

Keywords: Implementation, Inclusive Education, Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak untuk semua orang. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Meskipun secara tegas sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut, kasus diskriminasi dalam bidang pendidikan masih sering terjadi, khususnya terhadap anak berkebutuhan

khusus. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak normal, termasuk berhak memperoleh pendidikan dan belajar bersama anak normal di sekolah umum.

Salah satu program pendidikan yang dilakukan untuk mengatasi isu diskriminasi dalam bidang pendidikan adalah pendidikan inklusi. Penerapan sistem pendidikan inklusi ditujukan untuk memberikan peluang bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat masuk dalam sekolah reguler. Penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan terobosan baru untuk mengatasi masalah pendidikan

bagi anak berkebutuhan khusus tanpa harus ada pemisahan dengan anak normal lainnya.

Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara (Mohammad Takdir Ilahi, 2013: 24).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunardi, Yusuf, dkk (2010) mengenai implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia cukup tertata dengan presentase 61%. Selanjutnya, 149 sekolah (80,1%) dari 186 sampel sekolah telah memiliki program sekolah. Identifikasi dan asesmen telah dilaksanakan dengan baik di 72,5% sekolah, dan 55% sekolah telah melakukan modifikasi kurikulum. Modifikasi evaluasi telah dilakukan pada 51% sekolah inklusi, dan kepedulian terhadap pendidikan inklusi cukup menyenangkan dengan presentase 80,6%.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan. Menurut Solichin Abdul Wahab (2014:21), kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dan

bukan keputusan yang berdiri sendiri. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa proses implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan dan program kebijakan telah ditetapkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor. Beberapa teori implementasi menurut Subarsono (2005: 90-99) adalah seperti dari George C.Edwards III (1980), Merilee S.Grindle (1980), Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1983), dan Van Meter dan Van Horn (1975).

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang menaruh perhatian besar terhadap layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, terutama pendidikan inklusif. Pada tahun 2012, Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan *Inclusive Education Award* kategori pemerintah. Penghargaan tersebut diserahkan dari pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Pendidikan kepada Pemerintah Daerah yang dianggap memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan inklusi (Solider, 2014).

Kesungguhan Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta dan dikuatkan dengan munculnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota

Yogyakarta Nomor 188/Das/0026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta.

Penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta tahun 2014 telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor: 188/661. Melalui Surat Keputusan tersebut, terdapat 17 Sekolah Dasar (SD) yang sudah ditunjuk sebagai sekolah inklusi.

Meskipun sudah banyak sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak ditemukan beberapa masalah. Diantaranya adalah sekolah yang tidak sesuai dengan konsep-konsep yang mendasar, proses pembelajaran yang belum berjalan dengan baik, kesiapan guru yang masih rendah, sarana prasarana yang masih belum memadai, bahkan tidak jarang ditemukan adanya kesalahan praktek terutama terkait dengan aspek pemahaman dan sikap terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SD se-Kota Yogyakarta merupakan pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Peraturan Walikota Yogyakarta, maupun Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Definisi Implementasi Kebijakan

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif jenjang SD se-Kota Yogyakarta dapat dilihat dari variabel Struktur Birokrasi, Komunikasi, Sumberdaya, Lingkungan Kebijakan, dan Karakteristik Masalah.

Dari adanya beberapa kebijakan yang mengatur mengenai pendidikan inklusif tersebut, membuat penulis mengaggap perlu adanya penelitian mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SD se-Kota Yogyakarta. Harapannya melalui penelitian ini akan diketahui tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di masing-masing sekolah yang dilihat dari struktur birokrasi, komunikasi, sumberdaya, lingkungan kebijakan, dan karakteristik masalah. Selain itu, penulis juga akan mengetahui tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SD se-Kota Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar (SD) Penyelenggara Pendidikan Inklusif se-Kota Yogyakarta. Pengambilan

data di lapangan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2016.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 17 Sekolah Dasar (SD) Penyelenggara Pendidikan Inklusif se-Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian populasi.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lapangan, peneliti menggunakan kuesioner dan studi dokumen. Kuesioner dimodifikasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNS yang bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010. Mengacu pada teori implementasi dan modifikasi angket, maka instrumen penelitian terdiri dari 5 komponen, yang masing-masing komponen memiliki indikator seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1. Instrumen Penelitian

Komponen	Indikator
Struktur Birokrasi	Manajemen dan Kelembagaan
Komunikasi	1. Kesiswaan
	2. Identifikasi dan Asesmen
Sumberdaya	1. Kurikulum
	2. Pembelajaran
	3. Penilaian
Lingkungan Kebijakan	Dukungan
Karakteristik Masalah	Masalah dan Kendala

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif dalam bentuk tabulasi frekuensi dan presentase. Statistik deskriptif ini adalah angka yang mengikhtisarkan data. Teknik tersebut digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau mengumpulkan data yang telah terkumpul untuk membuat kesimpulan secara umum.

Indikator keberhasilan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SD se-Kota Yogyakarta dapat dilihat sesuai kriteria berikut:

Tabel 2. Indikator Keberhasilan

Kriteria	Presentase
Sangat Baik	81-100%
Baik	61-80%
Cukup	41-60%
Kurang	21-40%
Sangat Kurang	01-20%

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

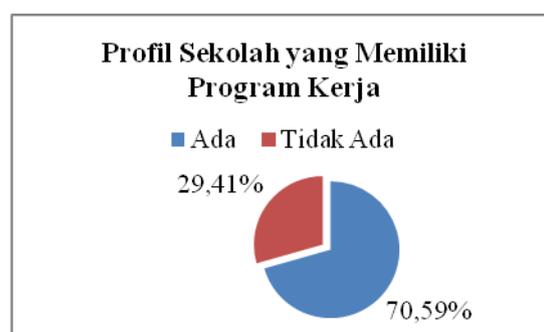
Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/Das/0026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta.

Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), terdapat 17 sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Profil Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif jenjang SD se-Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1) Dilihat dari status sekolah, 10 sekolah (58,82%) berstatus negeri dan 7 sekolah (41,18%) berstatus swasta; 2) Dilihat dari akreditasi sekolah, 16 sekolah (94,12%) telah berakreditasi A dan 1 sekolah (5,88%) berakreditasi B; 3) Dilihat dari tahun berdiri sekolah, SD Taman Muda IP merupakan sekolah yang paling lama berdiri, yaitu tahun 1922 dan SD Juara merupakan sekolah yang belum lama berdiri, yaitu tahun 2009; 4) Dilihat dari tahun mulai inklusi, SD Muh Sapen merupakan sekolah yang pertama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu tahun 2002.

Dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta, terdapat 5 komponen yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi. Komponen tersebut terdiri dari Struktur Birokrasi, Komunikasi, Sumberdaya, Lingkungan Kebijakan, dan Karakteristik Masalah.

Struktur Birokrasi merupakan elemen yang penting dalam suatu implementasi kebijakan. Menurut Edwards III (Subarsono, 2005:90-92), struktur

organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, komponen struktur birokrasi terdiri dari indikator manajemen dan kelembagaan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 12 sekolah (70,59%) dari 17 sekolah telah memiliki program kerja atau rencana kegiatan tertulis yang dilaksanakan dengan baik. Profil sekolah tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1. Profil Sekolah yang Memiliki Program Kerja

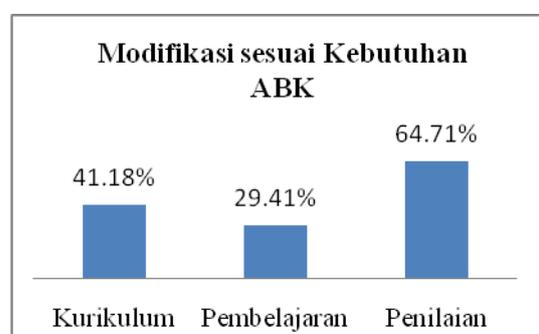
Selanjutnya, 15 sekolah (88,24%) telah mengangkat/menugaskan secara khusus terhadap salah seorang guru sebagai Koordinator Pelaksana Program Pendidikan Inklusi dengan sangat baik. Dalam membantu kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, 16 sekolah (94,12%) telah melibatkan pihak-pihak lain di luar sekolah dengan sangat baik. Dari 17 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta, 12 sekolah (70,59%) telah melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik

terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan baik.

Komunikasi merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edwards III (Subarsono, 2005: 90-92), keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam penelitian ini, komponen komunikasi terdiri dari indikator kesiswaan dan indikator identifikasi dan asesmen. Dalam indikator kesiswaan, terdapat 10 sekolah (58,82%) dari 17 sekolah yang menyediakan 'quota' (jatah kursi) bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan cukup baik. Dalam indikator identifikasi dan asesmen, 9 sekolah (52,94%) dari 17 sekolah telah memberikan layanan tes psikologi kepada semua peserta didik baru dengan cukup baik.

Komponen lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah tersedianya sumberdaya yang memadai. Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005: 99), implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*). Dalam penelitian ini, komponen sumberdaya terdiri dari aspek kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Dalam indikator kurikulum, 7 sekolah (41,18%) dari 17 sekolah telah

sebagian melakukan modifikasi kurikulum dan perangkat pembelajaran yang lain untuk mengakomodasi kebutuhan khusus ABK dalam setting pendidikan inklusif dengan cukup baik. Dalam indikator pembelajaran, terdapat 5 sekolah (29,41%) dari 17 sekolah yang telah melakukan modifikasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus ABK dalam setting pendidikan inklusif dengan kurang baik. Dalam indikator penilaian, terdapat 11 sekolah (64,71%) dari 17 sekolah yang melakukan modifikasi terhadap komponen evaluasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus ABK dengan baik. Apabila digambarkan melalui diagram, maka dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Modifikasi sesuai Kebutuhan ABK

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2005: 99) dipengaruhi oleh dua variabel besar. Salah satu variabel tersebut adalah lingkungan kebijakan. Dalam penelitian ini, lingkungan kebijakan terdiri dari indikator dukungan. Dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta, terdapat beberapa

dukungan atau bantuan dari pihak terkait. Dukungan tersebut diantaranya adalah dari orang tua murid, masyarakat, komite sekolah, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan Dinas Pendidikan Provinsi. Bentuk dukungan adalah adanya perhatian, kerjasama, motivasi, finansial, dan sosialisasi.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2005: 94), terdapat tiga kelompok yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Salah satu komponen tersebut adalah karakteristik masalah. Dalam penelitian ini, komponen karakteristik masalah terdiri dari indikator masalah dan kendala. Dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta, terdapat masalah dan kendala yang dihadapi sekolah. Kendala yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Guru Pendamping Kelas (GPK), dan Orang tua murid. Sedangkan untuk masalah terdiri dari beberapa aspek, yang diantaranya adalah sarana prasarana, bahan ajar/buku, kurikulum, sistem pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi.

Faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta terdiri dari adanya dukungan warga sekolah dan berbagai

pihak di luar sekolah. Dukungan dari warga sekolah dapat dilihat dari sekolah mendukung dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selain itu, di sebagian besar sekolah juga telah memiliki program kerja atau rencana kegiatan tertulis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selain dukungan dari warga sekolah, masih terdapat dukungan atau bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, seperti orang tua murid, masyarakat, komite sekolah, Dinas Pendidikan Kota, dan Dinas Pendidikan Provinsi.

Faktor penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta adalah Pemahaman dan Sikap Kepala Sekolah, Guru, dan Orang tua murid di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang belum optimal. Hal tersebut terjadi karena belum semuanya memahami mengenai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Selain itu, ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang kurang mencukupi dikarenakan masih terdapat sekolah yang belum mempunyai GPK. Selanjutnya, belum tersedianya sarana dan prasarana atau media khusus bagi ABK secara memadai dikarenakan oleh masalah biaya, belum tersedianya bahan ajar/buku yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, modifikasi kurikulum dan sistem pembelajaran yang belum dilaksanakan

dengan baik di sebagian besar sekolah, dan belum adanya peraturan baku mengenai pelaksanaan evaluasi yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri dari dukungan dari pihak sekolah dan pihak luar sekolah. Dalam hal ini, sebagian besar sekolah telah memiliki program kerja atau rencana kegiatan tertulis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Melalui program tersebut, faktor pendukung yang ada dapat dimanfaatkan sekolah sebagai pedoman atau acuan yang digunakan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selanjutnya, pihak luar sekolah juga telah mendukung dengan memberikan bentuk perhatian, kerjasama, motivasi, bantuan dana, pendampingan, dan sosialisasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa faktor pendukung tersebut dapat memberikan manfaat kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, pemanfaatan faktor pendukung yang ada dapat dijadikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan kebijakan yang telah diatur dan sebagai bahan perbaikan untuk selanjutnya.

Dilihat dari faktor penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan

inklusif, masih ditemukan bahwa pemahaman dan sikap Kepala Sekolah, Guru, dan Orang tua murid yang belum optimal. Dari faktor tersebut, solusi yang dilakukan sekolah adalah dengan mengadakan rapat secara berkala untuk memberikan pemahaman mengenai pendidikan inklusif. Selain itu, sekolah juga memberikan pendampingan kepada orang tua yang dijadikan solusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai pendidikan inklusif.

Selanjutnya, faktor penghambat yang lain adalah ketersediaan Guru Pendamping Khusus yang kurang mencukupi. Solusi sekolah dalam menghadapi faktor penghambat tersebut adalah dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada sebagian besar guru, sehingga guru kelas dapat memahami cara menghadapi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kategorinya. Selain itu, terdapat orang tua yang mencari Guru Pendamping Khusus bagi anaknya untuk membantu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Faktor penghambat selanjutnya adalah karena adanya masalah sarana dan prasarana, bahan ajar/buku, modifikasi kurikulum dan sistem pembelajaran, serta pelaksanaan evaluasi yang belum dilaksanakan secara optimal. Solusi dari faktor penghambat tersebut adalah dengan adanya bantuan dana yang diberikan dari Dinas Pendidikan setempat dan sosialisasi

mengenai modifikasi kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi. Dari beberapa solusi yang telah dijelaskan diatas, dapat dimaknai bahwa sekolah telah serius dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif yang dibuktikan dengan terus mengalami perbaikan terhadap penghambat yang ada di sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta terdiri dari 5 komponen yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu: (1) Struktur Birokrasi, terdiri dari indikator manajemen dan kelembagaan yaitu 12 sekolah (70,59%) telah memiliki program kerja atau rencana kegiatan tertulis yang dilaksanakan dengan baik. (2) Komunikasi, dilihat dari indikator kesiswaan yaitu 10 sekolah (58,82%) menyediakan 'quota' dengan cukup baik. Dilihat dari indikator identifikasi dan asesmen, 9 sekolah (52,94%) telah memberikan layanan tes psikologi dengan melibatkan psikolog, GPK, orangtua, dan puskesmas dengan cukup baik. (3) Sumberdaya, sekolah melakukan modifikasi yang disesuaikan kebutuhan ABK dalam indikator kurikulum dengan cukup baik (41,18%), pembelajaran dengan kriteria kurang (29,41%), dan penilaian dengan baik (64,71%). (4)

Lingkungan Kebijakan, terdiri dari indikator dukungan yaitu bantuan dari pihak terkait seperti orang tua murid, masyarakat, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam bentuk perhatian, kerjasama, motivasi, finansial, dan sosialisasi. (5) Karakteristik Masalah, terdiri dari indikator masalah yang terkait dengan sarana prasarana, bahan ajar/buku, kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi. Aspek kendala berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti Kepala Sekolah, Guru, GPK, dan Orang tua murid.

Faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diantaranya adalah dukungan dari warga sekolah dan pihak luar sekolah dalam menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sebagian besar sekolah memiliki program kerja atau rencana kegiatan tertulis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pihak luar sekolah memberikan dukungan kepada sekolah dengan bentuk perhatian, kerjasama, motivasi, finansial, dan sosialisasi. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diantaranya adalah pemahaman serta sikap Kepala Sekolah, Guru, dan Orang tua murid mengenai ABK yang belum optimal, ketersediaan GPK yang kurang

mencukupi, sarana prasarana dan bahan ajar/buku belum tersedia secara memadai, modifikasi kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi yang belum optimal.

Pemanfaatan faktor pendukung yang ada di sekolah dijadikan untuk membantu kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Sedangkan solusi dari faktor penghambat yaitu dengan adanya rapat, sosialisasi, pelatihan, dan bantuan dari Dinas Pendidikan yang dapat memberikan perbaikan sekolah untuk selanjutnya.

Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Kepala Sekolah
 - a. Kepala Sekolah perlu meningkatkan pemahaman mengenai konsep pendidikan inklusif agar pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dapat berjalan dengan baik.
 - b. Kepala Sekolah harus terus mengadakan kerjasama dengan pihak lain di luar sekolah untuk membantu kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

2. Bagi Guru

Guru perlu meningkatkan pemahaman mengenai cara menghadapi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang disesuaikan dengan kebutuhannya saat proses pembelajaran di kelas.

3. Bagi Siswa

Siswa reguler dapat menerima anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama di sekolahnya dan mengikuti pembelajaran dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman Mulyono. 2003. *Landasan Pendidikan Inklusif dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan LPTK*. Yogyakarta: Ditjen Dikti.
- Afan Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alimin Z. 2005. *Memahami Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: Jurusan PLB FIP UPI.
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2004. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas.
- Hery Kurnia Sulistyadi. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*. Universitas Airlangga: Prodi Ilmu Administrasi Negara.

- Kamal Fuadi. 2011. Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah: Prodi MP.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/Das/0026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta.
- Lay Kekeh Marthan. 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Dirjen Dikti Direktorat Ketenagaan.
- Mohammad Takdir Ilahi. 2013. *Pendidikan Inklusif Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solider. 2014. *Pendidikan Inklusi di Yogyakarta: Penghargaan dan Kenyataan*. Diakses melalui: solider.or.id/2014/02/24/pendidikan-inklusi-di-yogyakarta-penghargaan-dan-kenyataan.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunardi, Yusuf, dkk. 2010. *Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia*. UNS: LPPM UNS.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor: 188/661 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta Tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.